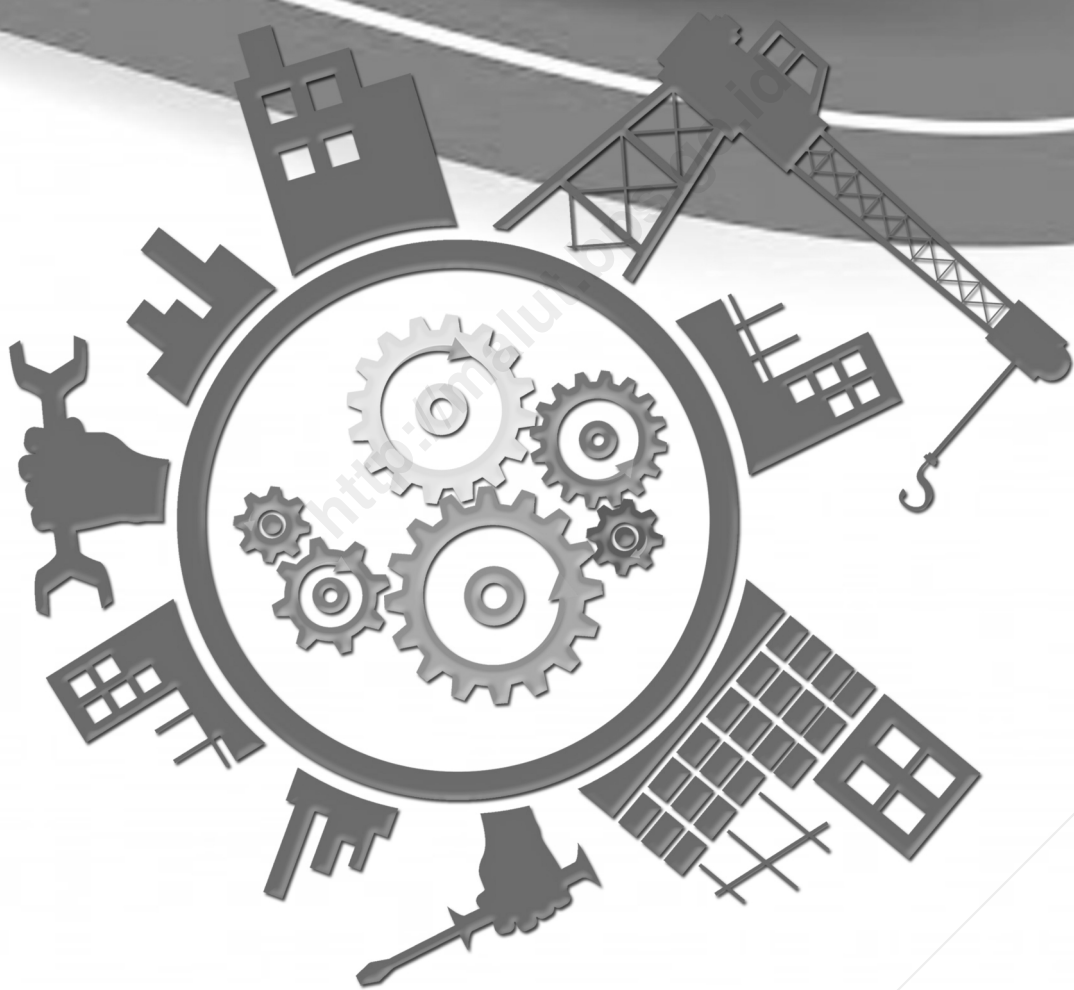


# INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

# INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2017



---

**INDIKATOR KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI MALUKU UTARA  
FEBRUARI 2017**

ISBN : 978-602-6755-41-4  
No. Publikasi : 82520.1707  
Katalog BPS : 2302003.82  
Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)  
Jumlah Halaman : vii + 29

Naskah:  
Seksi Statistik Kependudukan

Penyunting:  
Seksi Statistik Kependudukan

Gambar Kulit:  
Seksi Statistik Kependudukan

Diterbitkan oleh:  
© BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

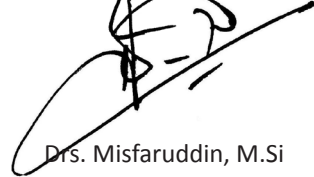
## KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Februari 2017 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Februari 2017. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, Agustus 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si

---

## DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA	6
INDIKATOR PENGANGGURAN	14
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK	19

<http://malut.bps.go.id>

---

<http://malut.bps.go.id>

---

# INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2017

## UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Kemudian pada 2011-2014 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Mulai tahun 2015, Sakernas dikembalikan lagi menjadi format semesteran, yaitu pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II) dengan jumlah sampel nasional sebanyak 50.000 rumah tangga dan estimasi data sampai level provinsi. Pada pelaksanaan Sakernas Agustus terdapat penambahan sampel sebanyak 150.000 rumah tangga, sehingga total sampel Sakernas Agustus adalah 200.000 rumah tangga dengan estimasi data sampai level kabupaten/kota.

Sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2017 di Provinsi Maluku Utara berjumlah 640 rumah tangga. *Response Rate* pada Sakernas Februari 2017 sebesar 98,59 persen. Dengan jumlah sampel tersebut estimasi yang disajikan adalah level provinsi dengan tabel-tabel yang dirinci menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah.

*Jumlah sampel  
Sakernas Februari 2017  
Provinsi Maluku Utara  
sebanyak 640 rumah  
tangga*

## TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Februari 2017 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

## CAKUPAN

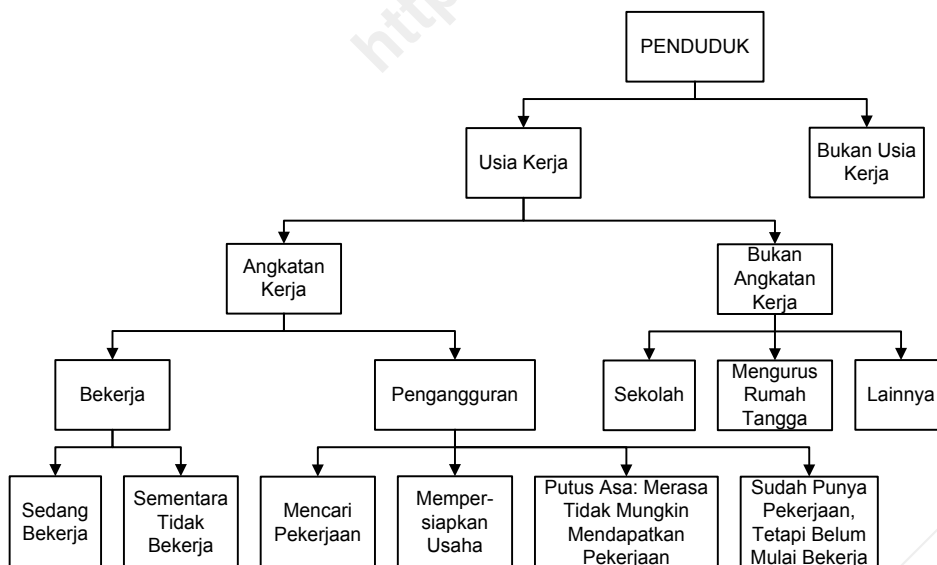
Pembahasan hasil Sakernas Februari 2017 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran dengan rincian menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya.

*Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran*

## PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini bertujuan untuk mengikuti standar internasional yang juga digunakan di negara lain. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

**Gambar 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN**





---

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah seminggu yang lalu yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

## **PARTISIPASI DUNIA KERJA**

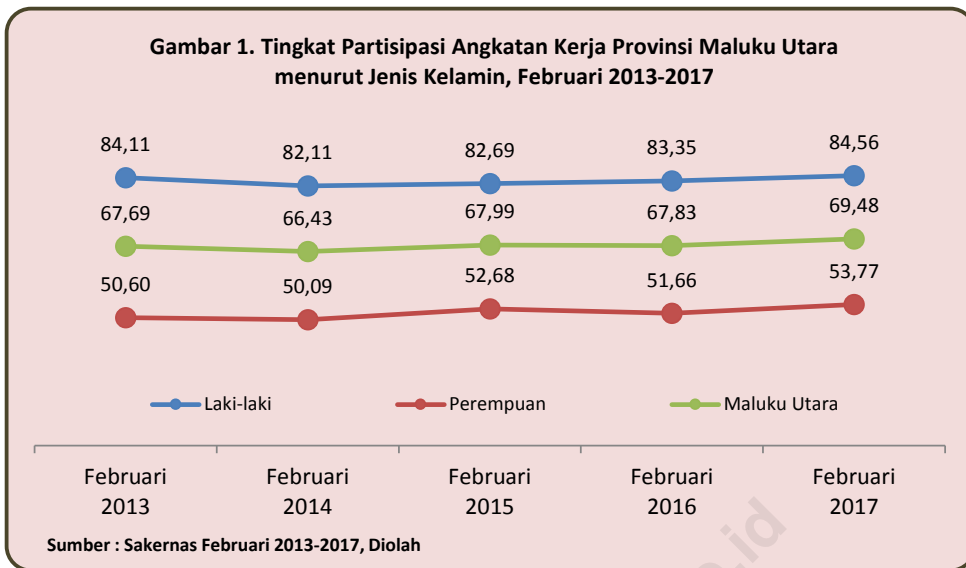
Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja disajikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah untuk memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

*TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)*

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.



Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Februari 2017, TPAK Maluku Utara mencapai 69,48 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya (67,83 persen). Angka tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 69 orang. Selebihnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

*Pada Februari 2017, TPAK Maluku Utara mencapai 69,48 persen, yang berarti terdapat 69 dari 100 orang penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi*

TPAK laki-laki pada Februari 2017 lebih besar dibanding TPAK perempuan. Pada Februari 2017 TPAK laki-laki sebesar 84,56 persen yang meningkat dibanding tahun sebelumnya (83,35 persen). Sementara itu, TPAK perempuan pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 51,66 persen pada Februari 2016 menjadi 53,77 persen pada Februari 2017.

Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama lima tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai TPAK yang dihasilkan, di mana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di bawah 55 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk laki-laki.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	79,36	59,05	69,31
Perdesaan	86,72	51,50	69,55
Perkotaan + Perdesaan	84,56	53,77	69,48

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

Tabel 1 menyajikan keterangan tenaga kerja Maluku Utara berdasarkan klasifikasi wilayah. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan (69,31 persen) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perdesaan (69,55 persen). Hal ini menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Maluku Utara telah cukup merata, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

*Proporsi penduduk usia kerja yang mengisi pasar tenaga kerja di perkotaan hampir sama dibanding di perdesaan.*

Selain itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan, dominasi penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi di Maluku Utara sangat terlihat. TPAK penduduk laki-laki hampir dua kali dari TPAK penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan yaitu masing-masing sebesar 79,36 persen dan 86,72 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan sedikit lebih tinggi dibanding dengan perdesaan yaitu 59,05 persen dibanding 51,50 persen.

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2015-2017

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	41,15	36,71	42,93
SMP	18,05	16,67	17,71
SMA Umum	24,02	25,59	21,00
SMA Kejuruan	4,87	6,02	5,13
Diploma I/II/III	3,36	3,52	2,31
Universitas	8,66	11,49	10,92
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Sebanyak 42,93 persen angkatan kerja di Maluku Utara merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD. Persentasenya meningkat dibanding tahun sebelumnya, kelompok penduduk ini masih menjadi penyumbang terbesar angkatan kerja di Maluku Utara.

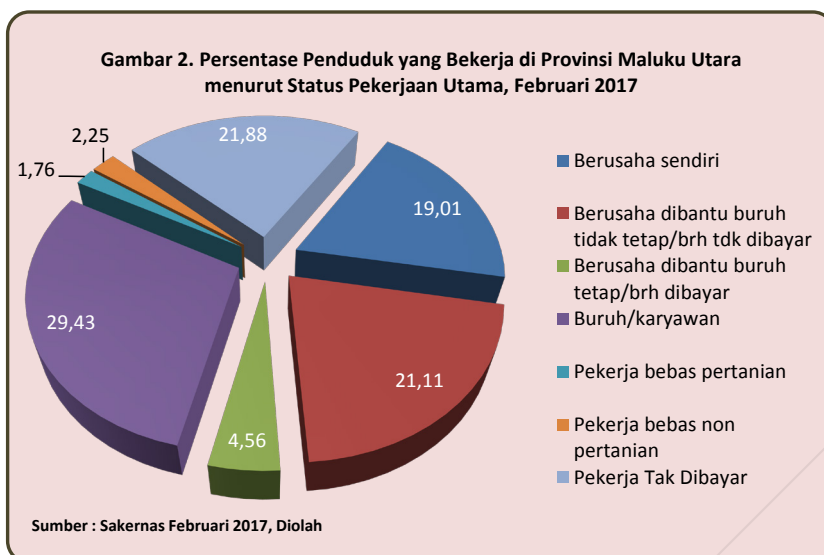
Sementara itu, kelompok penduduk dengan pendidikan SMA menyumbang angkatan kerja sebesar 21 persen, atau terbesar kedua. Pada periode 2016-2017, persentase angkatan kerja dengan pendidikan SMA mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan ini harus dilihat lebih rinci karena angkatan kerja bukan hanya penduduk yang bekerja, tapi juga terdapat pengangguran di dalamnya. Sebuah keuntungan jika penurunan tersebut disumbang oleh penduduk yang bekerja. Akan tetapi, menjadi beban jika yang mengalami peningkatan adalah penduduk yang menganggur, seperti penduduk yang baru lulus sekolah tapi belum terserap di lapangan pekerjaan yang tersedia.

*Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah.*

## PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

### a. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan bisa menjadi indikator yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan majunya pembangunan di suatu daerah biasanya terlihat adanya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.



Status Pekerjaan Utama pada Sakernas diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

*Sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan.*

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2017, dari tujuh kategori status pekerjaan, tertinggi pertama adalah pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu 29,43 persen. Diikuti oleh pekerja tidak dibayar sebesar 21,88 persen. Sementara, penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas tercatat masing-masing 1,76 persen di pertanian dan 2,25 persen di non pertanian.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2015-2017

Status Pekerjaan Utama	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	20,85	20,20	19,01
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	21,59	22,15	21,11
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	3,03	2,83	4,56
Buruh/karyawan	28,66	29,43	29,43
Pekerja bebas pertanian	3,28	1,53	1,76
Pekerja bebas non pertanian	2,86	2,37	2,25
Pekerja Tak Dibayar	19,73	21,49	21,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Pada 2015-2016 penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan. Namun dalam kurun dua tahun terakhir (2016-2017), pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai tidak mengalami perubahan. Sementara pekerja tak dibayar selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi pertumbuhan usaha pada sektor informal di Maluku Utara. Pada tahun 2015, pekerja tak dibayar mencapai 19,75 persen, meningkat menjadi 21,49 persen pada 2016 dan kembali meningkat pada 2017 menjadi 21,88 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Bekerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	17,11	19,79	20,82	15,98	19,01
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	15,56	23,38	24,62	15,21	21,11
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	4,31	4,66	5,89	2,32	4,56
Buruh/karyawan	48,62	21,58	31,60	25,77	29,43
Pekerja bebas pertanian	0,00	2,48	2,81	0,00	1,76
Pekerja bebas non pertanian	2,51	2,14	3,31	0,48	2,25
Pekerja Tak Dibayar	11,89	25,96	10,95	40,24	21,88
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan hampir separuhnya berstatus buruh/karyawan yaitu mencapai 48,62 persen. Sementara kelompok penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas, baik di pertanian maupun di non pertanian, masing-masing tercatat kurang dari tiga persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja.

Sementara itu, struktur penduduk yang bekerja di wilayah perdesaan menurut status bekerja cenderung merata dimana persentasenya tidak jauh berbeda antara penduduk yang berstatus berusaha sendiri (19,79 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (23,38 persen), dan buruh/karyawan/pegawai (21,58 persen). Hal lain yang cukup menarik adalah jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 25,96 persen. Angka tersebut dapat menjadi sebuah indikasi masih adanya budaya kekeluargaan dalam bekerja.

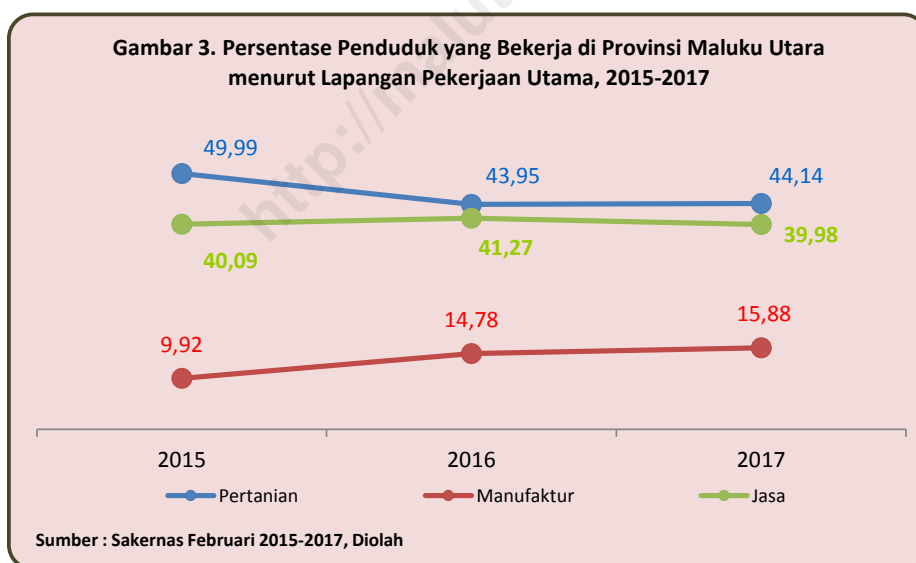
Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan cukup banyak yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 31,60 persen pada laki-laki dan 25,77 persen pada perempuan. Meski demikian, sebagian besar penduduk perempuan yang bekerja adalah pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 40,24 persen.

## b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

*Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja*

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacture*) dan jasa (*Services*), berdasarkan pada definisi sektor *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC) System*. Lapangan usaha Pertanian atau *Agriculture* terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lapangan usaha Industri atau *Manufacture* terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan konstruksi. Lapangan usaha Jasa-jasa atau *Services* adalah selain Pertanian dan Industri.



Selama tiga tahun terakhir sektor pertanian masih mejadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku Utara. Pada 2015-2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, dari 49,99 persen pada 2015 menjadi 43,95 persen pada 2016. Namun demikian, pekerja di sektor ini kembali naik menjadi

44,14 persen pada 2017. Sektor jasa (*services*) menjadi lapangan usaha terbesar kedua di Maluku Utara, meskipun pada dua tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Pada 2016 tercatat 41,27 persen penduduk yang bekerja di sektor jasa, turun pada 2017 menjadi 39,98 persen. Sedangkan sektor industri (*manufacture*), meskipun menjadi lapangan usaha paling kecil proporsinya, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 9,92 persen pada 2015, meningkat menjadi 14,78 persen pada 2016 dan kembali meningkat menjadi 15,88 persen pada 2017.

*Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.*

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	13,98	56,47	44,93	42,81	44,14
Manufaktur	15,95	15,86	19,39	10,00	15,88
Jasa	70,08	27,67	35,69	47,19	39,98
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

Dilihat dari lapangan usahanya hampir separuhnya yaitu mencapai 44,14 persen bekerja di sektor pertanian. Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan lapangan pekerjaan antara di perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perkotaan, lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor *Services*/jasa-jasa, dimana 70,08 persen dari penduduk yang bekerja di sektor ini. Sementara untuk wilayah perdesaan, sektor *Agriculture*/Pertanian tetap mendominasi dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mampu menampung sebesar 56,47 persen tenaga kerja. Sedangkan untuk industri tidak berbeda jauh antara daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 15,95 persen di perkotaan dan 15,86 persen di perdesaan.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan di sektor pertanian dan jasa. Tenaga kerja laki-laki lebih dominan diserap di sektor pertanian (44,93 persen). Sementara tenaga kerja perempuan lebih banyak diserap di sektor jasa (47,19 persen). Lain halnya dengan sektor manufaktur, di mana penyerapan tenaga kerja di sektor ini adalah terendah, baik pada tenaga kerja laki-laki ataupun perempuan.



### c. Penduduk Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

*Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu*

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Dengan melihat jumlah jam kerja selama seminggu terakhir dari penduduk yang bekerja, kita dapat mengetahui proporsi penduduk yang bekerja sebagai pekerja murni/ paruh waktu/ pekerja tidak penuh dan proporsi penduduk yang bekerja namun dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (*Full Time Worker*) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup itu termasuk pekerja paruh waktu (*Part Time Worker*).

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Februari 2015 - 2017

Status Pekerja	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	490.152	512.511	530.271
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	179.527	179.487	170.661
1. Setengah Penganggur	76.835	58.219	56.748
2. Pekerja Paruh Waktu	102.692	121.268	113.913
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	36,63	35,02	32,18
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	15,68	11,36	10,70
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	20,95	23,66	21,48

Sumber : Sakernas Februari 2015 - 2017, Diolah

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara terus mengalami penurunan, yaitu dari 36,63 persen pada 2015, turun menjadi 35,02 persen pada 2016 dan 32,18 persen pada 2017. Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja setengah penganggur juga mengalami penurunan dari 15,68 persen pada 2015 menjadi 10,70 persen pada 2017. Sementara itu, tingkat pekerja paruh waktu selama tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup fluktuatif. Pekerja paruh waktu pada 2015 sebesar 20,95 persen, meningkat menjadi 23,66 pada 2016 dan kembali turun menjadi 21,48 persen pada 2017.

*Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara mengalami penurunan.*

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja tidak penuh perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu sebesar 45,00 persen berbanding 24,56 persen. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan ini lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, ternyata tingkat pekerja tidak penuh di perdesaan (35,99 persen) lebih tinggi dibanding perkotaan (22,86 persen).

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara Menurut Status Bekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	153.905	376.366	332.486	197.785	530.271
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	35.190	135.471	81.656	89.005	170.661
1. Setengah Penganggur	9.156	47.592	34.837	21.911	56.748
2. Pekerja Paruh Waktu	26.034	87.879	46.819	67.094	113.913
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	22,86	35,99	24,56	45,00	32,18
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	5,95	12,65	10,48	11,08	10,70
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	16,92	23,35	14,08	33,92	21,48

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

#### d. Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal atau jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik dan pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

*Hampir separuh penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.*

Tabel 8. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2015-2017

Status Pekerja	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	42,59	37,50	44,47
SMP	18,13	17,25	17,72
SMA Umum	23,23	25,18	20,21
SMA Kejuruan	4,75	5,88	4,88
Diploma I/II/III	2,93	3,15	1,91
Universitas	8,37	11,04	10,82
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Selama periode Februari 2015 sampai dengan Februari 2017, sebagian besar penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu mencapai 44,47 persen di 2017. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja yang ada di Maluku Utara didominasi oleh penduduk dengan pendidikan maksimal adalah SD.

Tingkat pendidikan pekerja terbanyak kedua adalah SMA Umum. Namun demikian, pekerja dengan pendidikan SMA Umum mencapai angka terendah dibanding dua tahun sebelumnya. Pada 2015 pekerja berpendidikan SMA Umum mencapai 23,23 persen, naik menjadi 25,18 persen pada 2016 dan turun menjadi 20,21 persen pada 2017.

Pekerja yang berpendidikan SMP menempati urutan ketiga terbesar, yaitu mencapai 17,72 persen di 2017. Dengan melihat karakteristik tenaga kerja menurut pendidikan, maka dapat terlihat bahwa tenaga kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah ke bawah.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	24,36	52,69	41,13	50,08	44,47
SMP	17,52	17,80	20,04	13,81	17,72
SMA Umum	30,21	16,12	23,57	14,55	20,21
SMA Kejuruan	7,32	3,89	4,78	5,06	4,88
Diploma I/II/III	3,34	1,32	1,21	3,08	1,91
Universitas	17,24	8,19	9,28	13,41	10,82
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

Menurut daerah tempat tinggal, lebih dari setengah penduduk yang bekerja di wilayah desa berpendidikan SD ke bawah, yaitu mencapai 52,69 persen. Sementara di wilayah kota, kelompok terbesar penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMA Umum, yaitu sebesar 30,21 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan, masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 41,13 persen untuk laki-laki dan 50,08 persen untuk perempuan.

## INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

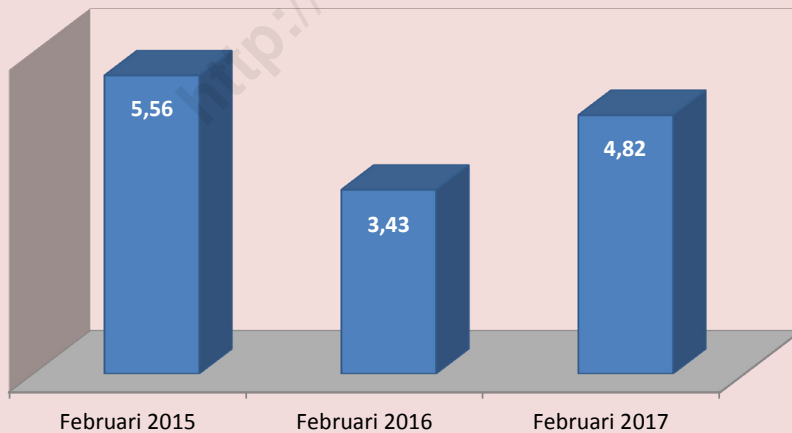
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

*T i n g k a t Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/ mempersiapkan usaha.*

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara aktif atau tidak mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja dan indikasi kegagalan mencari pekerjaan.

**Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara, Februari 2015-2017**



Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2015-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari 2015	7,22	4,89	5,02	6,43	5,56
Februari 2016	3,99	3,23	1,73	6,28	3,43
Februari 2017	6,81	3,98	3,90	6,33	4,82

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Pada Februari 2017, TPT Maluku Utara adalah sebesar 4,82 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 5 orang. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara cenderung mengalami penurunan. Pada Februari 2015, TPT Maluku Utara tercatat sebesar 5,56 persen. Kemudian menurun secara signifikan menjadi 3,43 persen pada Februari 2016. Pada Februari 2017 dan kembali meningkat menjadi 4,82, tetapi masih lebih rendah dibanding pada Februari 2015.

*T i n g k a t  
pengangguran di  
perkotaan selalu lebih  
tinggi daripada di  
pedesaan.*

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran di perkotaan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Tingkat pengangguran di perkotaan pada 2015-2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu dari 7,22 persen pada 2015 turun menjadi 3,99 persen pada 2016. Pada 2017, tingkat pengangguran kembali meningkat mendekati angka pada 2015, yaitu sebesar 6,81 persen.

Keadaan yang tidak jauh beda juga terjadi di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di pedesaan pada Februari 2015 tercatat sebesar 4,89 persen, turun menjadi 3,23 persen pada Februari 2016, dan naik menjadi 3,98 persen pada 2017. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang tenaga kerja laki-laki menjadi pekerja aktif di pasar tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2017

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	0,63	1,55	1,00	1,96	1,41
SMP	6,65	4,01	4,02	6,59	4,78
SMA Umum	10,88	6,43	5,57	15,36	8,41
SMA Kejuruan	6,35	11,46	8,61	10,39	9,31
Diploma I/II/III	23,34	19,67	10,57	27,47	21,58
Universitas	3,91	7,22	8,07	2,82	5,72
Maluku Utara	6,81	3,98	3,90	6,33	4,82

Sumber : Sakernas Februari 2017, Diolah

*T i n g k a t pengangguran tertinggi adalah lulusan diploma I/II/III yaitu mencapai 21,58 persen pada tahun 2017.*

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan diploma I/II/III yaitu mencapai 21,58 persen, baik di daerah perkotaan (23,34 persen) ataupun perdesaan (19,67 persen). Kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang dirasa cukup tinggi serta terlalu memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih rendah) cenderung membuat para lulusan diploma I/II/III ini melewatkan kesempatan kerja yang bisa didapatkan dengan mudah. Apabila dilihat dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan, maka dapat dikatakan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai untuk lulusan diploma I/II/III.

Berdasarkan jenis kelamin, lulusan diploma I/II/III pada penduduk perempuan menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran, begitu juga pada penduduk laki-laki. Tingkat pengangguran terendah pada laki-laki ataupun perempuan yaitu berasal dari lulusan SD ke bawah.

---

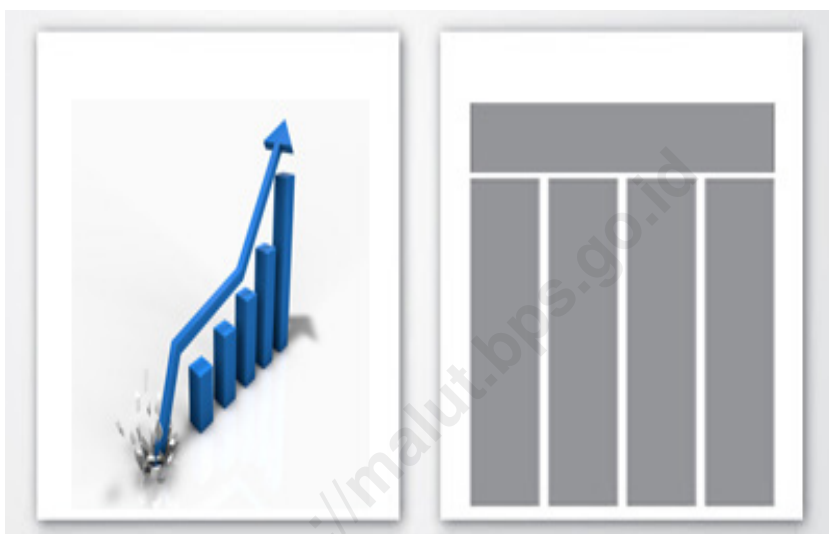
<http://malut.bps.go.id>

---



---

# LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK



**Tabel Lampiran 1. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2014-2017**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	108.769	110.717	112.722	114.502
Halmahera Tengah	48.414	49.807	51.315	52.813
Kepulauan Sula	93.435	95.285	97.177	99.196
Halmahera Selatan	215.791	219.836	223.460	227.280
Halmahera Utara	176.573	180.100	183.596	187.104
Halmahera Timur	82.914	85.188	87.680	90.070
Pulau Morotai	59.102	60.727	62.412	64.001
Pulau Taliabu	50.067	50.709	51.316	51.928
Ternate	207.789	212.997	218.028	223.111
Tidore Kepulauan	95.813	96.979	98.206	99.337
Maluku Utara	1.138.667	1.162.345	1.185.912	1.209.342

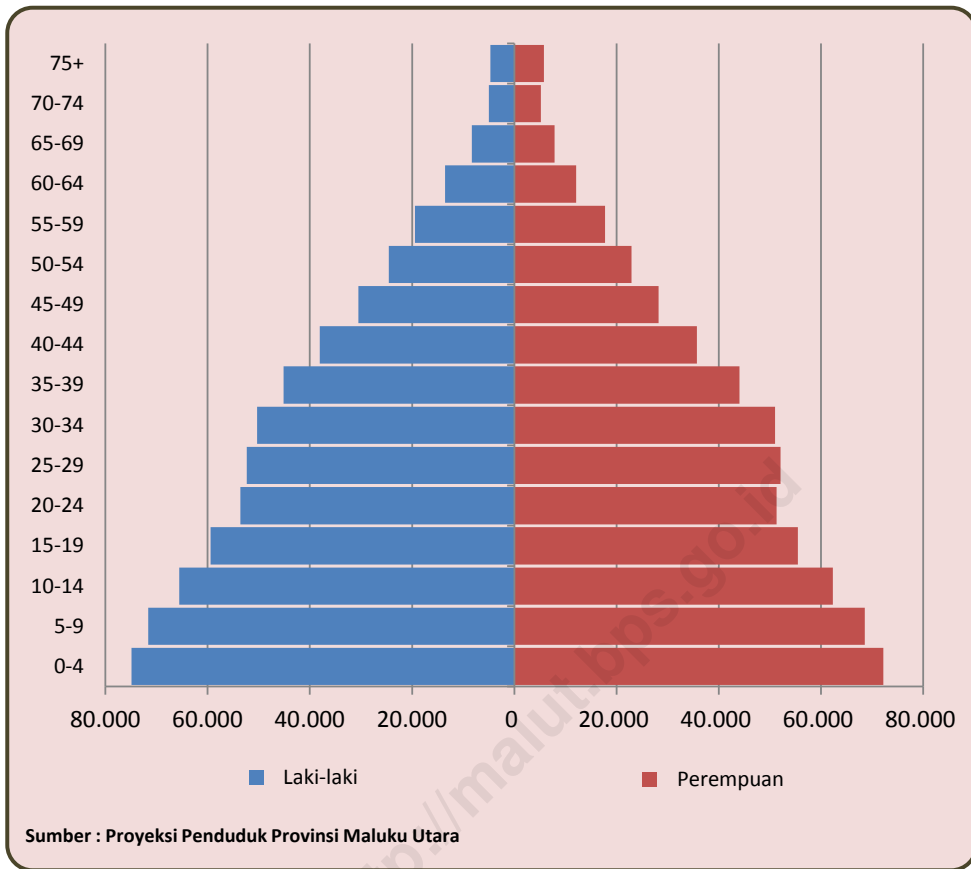
Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

**Tabel Lampiran 2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	74.889	72.175	147.064
5-9	71.628	68.581	140.209
10-14	65.525	62.281	127.806
15-19	59.438	55.439	114.877
20-24	53.577	51.308	104.885
25-29	52.309	52.079	104.388
30-34	50.296	50.986	101.282
35-39	45.157	44.052	89.209
40-44	38.058	35.717	73.775
45-49	30.481	28.241	58.722
50-54	24.529	22.943	47.472
55-59	19.407	17.735	37.142
60-64	13.569	12.077	25.646
65-69	8.337	7.891	16.228
70-74	5.002	5.198	10.200
75+	4.656	5.781	10.437
<b>Jumlah</b>	<b>616.858</b>	<b>592.484</b>	<b>1.209.342</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Gambar Lampiran 1. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara, 2017

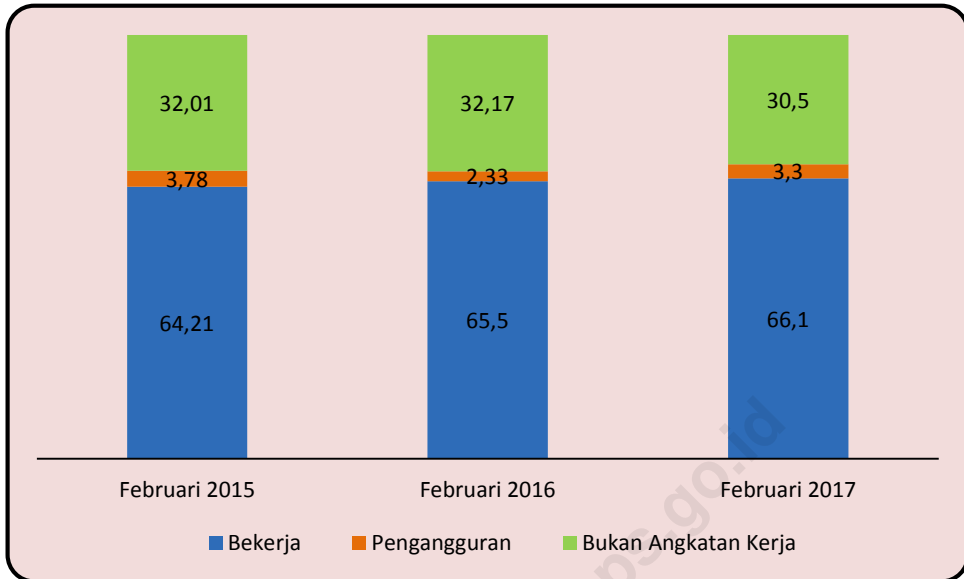


**Tabel Lampiran 3. Penduduk Usia Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2015-2017**

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	763 299	782 438	801 856
2. Angkatan Kerja	518 982	530 721	557 120
Bekerja	490 152	512 511	530 271
Penganggur	28 830	18 210	26 849
3. Bukan Angkatan Kerja	244 317	251 717	244 736
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,99	67,83	69,48
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56	3,43	4,82
6. Pekerja Tidak Penuh	179 527	179 487	170 661
Setengah Penganggur	76 835	58 219	56 748
Paruh Waktu	102 692	121 268	113 913

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

Gambar Lampiran 2. Persentase Penduduk Usia Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2015-2017



**Tabel Lampiran 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2015-2017**

Status Pekerja	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	42,59	37,50	44,47
SMP	18,13	17,25	17,72
SMA Umum	23,23	25,18	20,21
SMA Kejuruan	4,75	5,88	4,88
Diploma I/II/III	2,93	3,15	1,91
Universitas	8,37	11,04	10,82
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah

**Tabel Lampiran 5. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Usaha Utama, Februari 2015-2017**

Lapangan Usaha	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	49,99	50,23	43,95
2 Pertambangan dan Penggalian	3,38	2,46	4,06
3 Industri	1,82	3,60	5,15
4 Listrik, Gas, dan Air Minum	0,04	0,25	0,60
5 Konstruksi	4,68	4,82	4,99
6 Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	14,86	13,20	14,67
7 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,40	6,61	6,34
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,91	1,27	1,58
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan	17,93	17,56	18,67
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sakernas Februari 2015-2017, Diolah



**Tabel Lampiran 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2015-2017**

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	2,25	1,36	1,41
Sekolah Menengah Pertama	5,12	0,06	4,78
Sekolah Menengah Atas	8,66	4,97	8,41
Sekolah Menengah Kejuruan	7,92	5,55	9,31
Diploma I/II/III	17,64	13,72	21,58
Universitas	7,55	7,26	5,72
<b>Total</b>	<b>5,56</b>	<b>3,43</b>	<b>4,82</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

<http://malut.bps.go.id>

---

## GLOSARIUM

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
  - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
  - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

---

<http://malut.bps.go.id>

---

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate - 97712

Telp : (0921) 3127878, Fax : (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)

ISBN 978-602-6755-41-4



9

786026

755414